PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
2025, Vol. 3, No. 2, pp. 47-56
E-ISSN: 3025-9452

Transformasi Digital dan Reproduksi Ketimpangan Sosial Ekonomi di Wilayah Perkotaan Indonesia

Ahmad Rizky Muharrar [1]✉, Diah Lestari Wulandari[2]
(1,2) Program Studi Sosiologi, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

Abstrak: Transformasi digital di wilayah perkotaan Indonesia berkembang cepat, namun proses ini tidak selalu menghasilkan pemerataan sosial ekonomi. Artikel ini menganalisis bagaimana transformasi digital mereproduksi ketimpangan sosial ekonomi di perkotaan melalui perbedaan akses, pemanfaatan, dan hasil ekonomi dari teknologi digital. Studi ini menggunakan pendekatan analisis literatur empiris dan sintesis temuan kuantitatif dari penelitian terdahulu yang menelaah kesenjangan digital, ketimpangan pendapatan, serta dinamika pembangunan perkotaan di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa wilayah perkotaan dengan infrastruktur digital maju cenderung memperkuat posisi kelompok berpendapatan menengah ke atas, sementara kelompok miskin perkotaan menghadapi keterbatasan literasi digital, akses perangkat, dan kualitas konektivitas. Kondisi ini berdampak pada peluang kerja digital, akses layanan publik berbasis teknologi, dan partisipasi ekonomi. Temuan juga menunjukkan bahwa kebijakan transformasi digital yang berorientasi efisiensi belum sepenuhnya terintegrasi dengan agenda keadilan sosial. Artikel ini menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan digital yang inklusif dan berbasis spasial untuk menekan reproduksi ketimpangan sosial ekonomi di wilayah perkotaan Indonesia.

Article history:
Received: 11 February 2025
Revised: 17 April 2025
Accepted: 21 May 2025
Published: 28 May 2025

Kata Kunci:
transformasi digital, ketimpangan sosial ekonomi, wilayah perkotaan, kesenjangan digital, Indonesia

Abstract: *Digital transformation in urban areas in Indonesia is progressing rapidly, but this process does not always result in socioeconomic equality. This article analyzes how digital transformation reproduces socioeconomic inequality in urban areas through differences in access, utilization, and economic outcomes from digital technology. This study uses an empirical literature analysis approach and a synthesis of quantitative findings from previous research examining the digital divide, income inequality, and the dynamics of urban development in Indonesia. The results show that urban areas with advanced digital infrastructure tend to strengthen the position of middle- and upper-income groups, while the urban poor face limitations in digital literacy, device access, and connectivity quality. This condition impacts digital job opportunities, access to technology-based public services, and economic participation. The findings also indicate that efficiency-oriented digital transformation policies have not been fully integrated with the social justice agenda. This article emphasizes the importance of an inclusive and spatially based digital policy approach to reduce the reproduction of socioeconomic inequality in urban areas in Indonesia.*

Keyword:
digital transformation, socio-economic inequality, urban regions, the digital divide, Indonesia

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

How to cite: Muharrar, A. R., & Wulandari, D. L. (2025). Transformasi Digital dan Reproduksi Ketimpangan Sosial Ekonomi di Wilayah Perkotaan Indonesia. *PERSEPTIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *3*(2), 47-56. https://doi.org/10.70716/perseptif.v3i2.435

PENDAHULUAN

Transformasi digital menjadi salah satu agenda utama pembangunan nasional Indonesia dalam dua dekade terakhir. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong perubahan signifikan pada struktur ekonomi, pola kerja, sistem pelayanan publik, dan interaksi sosial, terutama di wilayah perkotaan. Kota berfungsi sebagai pusat adopsi teknologi digital karena konsentrasi infrastruktur, pasar, dan sumber daya manusia relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan. Namun, percepatan digitalisasi di perkotaan tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan manfaat

✉ *Corresponding author: ahmadrizky m@gmail.com*
Copyright © 2025, the author(s)

sosial ekonomi. Sejumlah studi menunjukkan bahwa transformasi digital justru berpotensi mereproduksi dan memperdalam ketimpangan sosial ekonomi yang telah ada.

Ketimpangan sosial ekonomi di Indonesia masih menjadi persoalan struktural, meskipun indikator makroekonomi menunjukkan tren pertumbuhan positif. Simbolon dan Sirait (2025) mencatat bahwa disparitas pendapatan antara wilayah perkotaan dan perdesaan pada periode 2019–2023 tetap tinggi, dengan ketimpangan intra-perkotaan yang semakin kompleks. Di dalam kota, kelompok masyarakat berpendapatan rendah sering terkonsentrasi pada sektor informal dengan tingkat keamanan kerja rendah dan akses terbatas terhadap teknologi produktif. Dalam konteks ini, transformasi digital tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi dengan struktur sosial ekonomi yang timpang.

Literatur tentang kesenjangan digital menegaskan bahwa akses terhadap teknologi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi juga oleh faktor pendidikan, pendapatan, usia, dan lokasi spasial. Sujarwoto dan Tampubolon (2013) menunjukkan bahwa sejak periode 2005–2009, kesenjangan digital di Indonesia cenderung semakin dalam dan beriringan dengan pelebaran kesenjangan spasial. Temuan ini relevan hingga saat ini, mengingat adopsi teknologi digital semakin menentukan akses terhadap peluang ekonomi, informasi, dan layanan publik. Kartiasih et al. (2022) menegaskan bahwa ketimpangan pembangunan digital regional di Indonesia berkorelasi kuat dengan karakteristik sosial ekonomi, termasuk tingkat kemiskinan dan pendidikan.

Di wilayah perkotaan, digitalisasi ekonomi berkembang pesat melalui platform perdagangan elektronik, layanan berbasis aplikasi, dan ekonomi gig. Kristyanto dan Jamil (2023) mencatat bahwa transformasi digital berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif dalam jangka panjang, tetapi dampaknya sangat bergantung pada kapasitas adaptasi kelompok masyarakat. Kelompok dengan literasi digital tinggi dan modal ekonomi memadai mampu memanfaatkan peluang kerja digital dan ekspansi usaha. Sebaliknya, kelompok miskin perkotaan sering terjebak sebagai pengguna pasif atau tenaga kerja dengan posisi tawar rendah dalam ekosistem digital. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa digitalisasi dapat mereproduksi ketimpangan, bukan sekadar menguranginya.

Konsep reproduksi ketimpangan digital dijelaskan secara sistematis oleh Hargittai (2018), yang menekankan bahwa perbedaan dalam keterampilan, penggunaan, dan hasil dari teknologi digital menghasilkan bentuk ketimpangan baru. Dalam masyarakat perkotaan Indonesia, perbedaan ini tampak pada akses pendidikan berbasis teknologi, peluang kerja berbasis platform, dan kemampuan memanfaatkan layanan publik digital. Isma et al. (2025) menunjukkan bahwa transformasi digital dalam layanan publik memang meningkatkan efisiensi dan jangkauan, tetapi kelompok dengan keterbatasan akses digital sering tertinggal dalam memanfaatkan layanan tersebut secara optimal.

Kebijakan pembangunan digital nasional selama ini lebih menekankan pada perluasan infrastruktur dan inovasi teknologi. Sunuantari (2021) menilai bahwa agenda transformasi menuju masyarakat informasi Indonesia telah mendorong pertumbuhan pengguna internet dan layanan digital secara signifikan. Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya mempertimbangkan dimensi keadilan sosial dan ketimpangan intra-wilayah. Kustanto (2024) menemukan bahwa difusi teknologi informasi dan komunikasi memiliki dampak ganda terhadap ketimpangan pendapatan. Pada wilayah dengan kesiapan sosial ekonomi tinggi, digitalisasi menekan ketimpangan. Sebaliknya, pada wilayah dengan kapasitas rendah, digitalisasi justru memperlebar jurang pendapatan.

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Fenomena ketimpangan sosial di wilayah perkotaan juga dipengaruhi oleh dinamika kemiskinan struktural. Watif et al. (2024) dan Tahir et al. (2025) menunjukkan bahwa masyarakat miskin perkotaan menghadapi tekanan ganda berupa biaya hidup tinggi dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal. Dalam konteks digital, kelompok ini sering menghadapi hambatan berupa keterbatasan perangkat, konektivitas tidak stabil, dan rendahnya literasi digital. Agwenyi dan Wabwoba (2024) menegaskan bahwa masyarakat informasi cenderung memperdalam ketimpangan ketika kebijakan publik gagal menjangkau kelompok rentan secara sistematis.

Kajian kebijakan menunjukkan bahwa upaya menjembatani kesenjangan digital memerlukan kombinasi antara mekanisme pasar dan peran negara. Bhuiyan (2014) menekankan pentingnya intervensi negara dalam mengoreksi kegagalan pasar digital, terutama untuk menjamin akses yang adil. Di Indonesia, strategi perekonomian digital yang dikaji oleh Suyanto et al. (2024) menyoroti perlunya inovasi kebijakan yang sensitif terhadap disparitas regional dan sosial. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan koordinasi dan keterbatasan data spasial yang detail.

Dalam konteks perkotaan Asia Tenggara, Chen (2025) menunjukkan bahwa konsep kota cerdas sering menimbulkan paradoks antara efisiensi teknologi dan keadilan sosial. Penggunaan teknologi dalam tata kelola perkotaan cenderung menguntungkan kelompok yang sudah terintegrasi secara digital. Temuan ini sejalan dengan studi Choczyńska (2024) tentang ketimpangan digital interseksional di Indonesia, yang menekankan bahwa gender, kelas sosial, dan lokasi memperkuat dampak eksklusi digital. Dengan demikian, transformasi digital di kota tidak dapat dipahami hanya sebagai proses teknis, tetapi sebagai fenomena sosial ekonomi yang kompleks.

Sejumlah penelitian terbaru juga menyoroti hubungan antara transformasi digital, pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Nasution et al. (2025) menemukan keterkaitan antara transformasi digital, indeks pembangunan manusia, dan pola konsumsi. Namun, manfaat tersebut tidak terdistribusi merata antar kelompok sosial. Putri et al. (2025) menunjukkan bahwa ekonomi digital di Indonesia mendorong ekspansi kelas menengah, tetapi sekaligus menekan kelompok rentan yang tidak mampu beradaptasi dengan cepat. Hal ini memperkuat urgensi analisis kritis terhadap dampak distribusional digitalisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa transformasi digital di wilayah perkotaan Indonesia mengandung kontradiksi mendasar. Di satu sisi, digitalisasi membuka peluang pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan efisiensi layanan publik. Di sisi lain, tanpa desain kebijakan yang inklusif, proses ini berpotensi mereproduksi ketimpangan sosial ekonomi yang telah mengakar. Ningsih et al. (2024) menekankan bahwa kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural dan kebijakan, termasuk arah pembangunan teknologi.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis hubungan antara transformasi digital dan reproduksi ketimpangan sosial ekonomi di wilayah perkotaan Indonesia. Fokus analisis diarahkan pada mekanisme bagaimana akses, pemanfaatan, dan hasil dari teknologi digital memperkuat diferensiasi sosial ekonomi. Artikel ini berkontribusi pada literatur dengan mengintegrasikan perspektif kesenjangan digital, ketimpangan perkotaan, dan kebijakan pembangunan digital dalam konteks Indonesia. Temuan diharapkan dapat menjadi dasar empiris dan konseptual bagi perumusan kebijakan transformasi digital yang lebih adil dan berkelanjutan.

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi analitis berbasis sintesis empiris dan kebijakan. Pendekatan ini dipilih untuk menelaah secara sistematis hubungan antara transformasi digital dan reproduksi ketimpangan sosial ekonomi di wilayah perkotaan Indonesia. Fokus utama penelitian terletak pada mekanisme struktural yang menghubungkan akses digital, pemanfaatan teknologi, dan hasil sosial ekonomi pada kelompok masyarakat perkotaan yang berbeda.

Desain Penelitian

Desain penelitian mengadopsi model kajian analitis deskriptif dan komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk memetakan pola transformasi digital dan karakteristik ketimpangan sosial ekonomi di wilayah perkotaan. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan temuan antar studi empiris yang relevan dalam konteks Indonesia. Desain ini memungkinkan identifikasi pola konsisten dan perbedaan temuan terkait dampak digitalisasi terhadap kelompok sosial ekonomi tertentu.

Sumber Data dan Unit Analisis

Data penelitian bersumber dari artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan buku akademik yang tercantum dalam daftar pustaka penelitian ini. Seluruh sumber merupakan hasil penelitian empiris atau kajian kebijakan yang berfokus pada transformasi digital, kesenjangan digital, ketimpangan sosial ekonomi, dan dinamika perkotaan di Indonesia. Unit analisis penelitian meliputi wilayah perkotaan Indonesia sebagai entitas spasial, serta kelompok sosial ekonomi yang terlibat dalam proses transformasi digital, seperti rumah tangga berpendapatan rendah, kelas menengah, dan pelaku ekonomi digital.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap referensi yang telah ditetapkan. Setiap sumber ditelaah untuk mengidentifikasi temuan empiris terkait tiga dimensi utama. Dimensi pertama adalah akses digital, yang mencakup ketersediaan infrastruktur, konektivitas, dan perangkat teknologi. Dimensi kedua adalah pemanfaatan digital, yang meliputi literasi digital, penggunaan platform ekonomi digital, dan akses layanan publik berbasis teknologi. Dimensi ketiga adalah hasil sosial ekonomi, yang mencakup pendapatan, peluang kerja, inklusi sosial, dan kualitas hidup masyarakat perkotaan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama. Tahap pertama adalah ekstraksi data tematik, yaitu pengelompokan temuan penelitian berdasarkan indikator akses, pemanfaatan, dan hasil digitalisasi. Tahap kedua adalah analisis hubungan kausal konseptual untuk menilai bagaimana transformasi digital berinteraksi dengan struktur sosial ekonomi perkotaan. Tahap ketiga adalah sintesis analitis, yaitu integrasi temuan lintas studi untuk merumuskan pola umum reproduksi ketimpangan sosial ekonomi akibat digitalisasi.

Analisis dilakukan secara kritis dengan memperhatikan konteks spasial dan temporal masing-masing studi. Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, seperti analisis spasial dan multivariat, digunakan untuk memperkuat argumen empiris. Penelitian kualitatif dan kajian kebijakan

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

digunakan untuk menjelaskan mekanisme sosial dan kelembagaan yang mendasari temuan kuantitatif.

Kerangka Analisis

Kerangka analisis penelitian ini mengacu pada teori kesenjangan digital dan reproduksi ketimpangan sosial. Transformasi digital diposisikan sebagai variabel struktural yang memengaruhi distribusi sumber daya ekonomi dan sosial. Ketimpangan sosial ekonomi dipahami sebagai hasil interaksi antara faktor teknologi, kapasitas individu, dan kebijakan publik. Kerangka ini memungkinkan analisis hubungan tidak langsung dan bersifat kumulatif antara digitalisasi dan ketimpangan perkotaan.

Validitas dan Keandalan Analisis

Validitas analisis dijaga melalui konsistensi penggunaan sumber dan kesesuaian konteks sitasi. Setiap temuan yang diangkat diverifikasi melalui perbandingan antar studi dengan fokus wilayah dan periode yang relevan. Keandalan analisis diperkuat dengan penggunaan sumber terkini dan bereputasi, serta dengan penempatan hasil penelitian sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan.

Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ketergantungan terhadap data sekunder dari studi sebelumnya. Penelitian ini tidak mengumpulkan data primer, sehingga tidak melakukan pengujian statistik langsung. Namun, keterbatasan ini diimbangi dengan keluasan cakupan studi dan kedalaman analisis sintesis empiris. Pendekatan ini tetap relevan untuk menjelaskan pola struktural transformasi digital dan ketimpangan sosial ekonomi di wilayah perkotaan Indonesia secara sistematis dan dapat direplikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil sintesis empiris dari studi-studi yang dianalisis serta pembahasan kritis mengenai mekanisme bagaimana transformasi digital mereproduksi ketimpangan sosial ekonomi di wilayah perkotaan Indonesia. Hasil disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu akses digital, pemanfaatan teknologi digital, dan dampak sosial ekonomi. Pembahasan mengintegrasikan temuan lintas studi untuk menjelaskan pola struktural yang konsisten.

Pola Akses Digital di Wilayah Perkotaan

Hasil analisis menunjukkan bahwa wilayah perkotaan Indonesia memiliki tingkat penetrasi infrastruktur digital yang lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan, namun distribusinya tidak merata di dalam kota. Kartiasih et al. (2022) dan Wati et al. (2024) menunjukkan adanya variasi signifikan antarprovinsi dan antarwilayah perkotaan dalam hal kualitas jaringan internet, kepemilikan perangkat, dan stabilitas konektivitas. Kawasan pusat bisnis dan permukiman kelas menengah atas menikmati akses broadband yang lebih andal, sementara kawasan padat penduduk dan permukiman informal sering mengalami konektivitas rendah.

Kesenjangan akses ini memperkuat temuan Sujarwoto dan Tampubolon (2013) yang menegaskan bahwa kesenjangan digital di Indonesia bersifat spasial dan kumulatif. Di wilayah perkotaan, perbedaan akses bukan lagi sekadar antara kota dan desa, tetapi antarsegmen sosial dalam

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

satu kota. Kondisi ini menciptakan basis awal ketimpangan, karena akses digital menjadi prasyarat utama untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi dan sosial berbasis teknologi.

Pemanfaatan Teknologi Digital dan Diferensiasi Sosial

Dimensi kedua yang menonjol adalah perbedaan pemanfaatan teknologi digital. Kristyanto dan Jamil (2023) serta Kustanto (2024) menunjukkan bahwa adopsi teknologi informasi dan komunikasi berdampak berbeda antar kelompok pendapatan. Kelompok berpendapatan menengah dan tinggi cenderung menggunakan teknologi digital untuk aktivitas produktif, seperti pengembangan usaha, peningkatan keterampilan, dan akses pasar digital. Sebaliknya, kelompok miskin perkotaan lebih banyak menggunakan teknologi untuk konsumsi pasif, seperti hiburan dan komunikasi dasar.

Hargittai (2018) menjelaskan fenomena ini sebagai kesenjangan tingkat kedua, yaitu perbedaan keterampilan dan pola penggunaan teknologi. Temuan ini diperkuat oleh Agwenyi dan Wabwoba (2024) yang menekankan bahwa literasi digital menjadi faktor penentu utama dalam menghasilkan manfaat ekonomi dari digitalisasi. Di perkotaan Indonesia, kesenjangan literasi digital sering berkorelasi dengan tingkat pendidikan dan stabilitas pekerjaan.

Akses terhadap layanan publik digital juga menunjukkan pola serupa. Isma et al. (2025) dan Uang dan Susniwati (2025) menemukan bahwa digitalisasi layanan publik meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi tidak sepenuhnya inklusif. Kelompok masyarakat dengan keterbatasan literasi digital dan akses perangkat mengalami hambatan administratif baru. Hal ini memperlihatkan bahwa transformasi digital dapat menciptakan bentuk eksklusi sosial yang bersifat institusional.

Dampak Sosial Ekonomi dan Reproduksi Ketimpangan

Hasil sintesis menunjukkan bahwa dampak transformasi digital terhadap ketimpangan sosial ekonomi di perkotaan bersifat ambivalen. Nasution et al. (2025) dan Putri et al. (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan ekspansi kelas menengah. Namun, manfaat tersebut terkonsentrasi pada kelompok yang telah memiliki modal ekonomi dan sosial. Kelompok rentan menghadapi risiko tertinggal lebih jauh karena keterbatasan adaptasi.

Simbolon dan Sirait (2025) mencatat bahwa ketimpangan pendapatan perkotaan tetap tinggi dalam periode 2019–2023, meskipun terjadi ekspansi ekonomi digital. Temuan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berbasis digital tidak secara otomatis menurunkan ketimpangan. Watif et al. (2024) dan Tahir et al. (2025) menegaskan bahwa kemiskinan perkotaan memiliki karakter multidimensi, termasuk kerentanan kerja dan keterbatasan akses teknologi produktif.

Dalam konteks kebijakan, Bhuiyan (2014) dan Suyanto et al. (2024) menekankan pentingnya peran negara dalam mengoreksi ketimpangan digital. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa kebijakan digital di Indonesia masih berfokus pada ekspansi infrastruktur dan inovasi teknologi, belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan pengurangan ketimpangan. Chen (2025) menunjukkan bahwa pendekatan kota cerdas di kawasan Asia Tenggara sering mengabaikan dimensi keadilan sosial, dan temuan ini relevan dengan konteks perkotaan Indonesia.

Sintesis Temuan Empiris

Tabel berikut merangkum pola temuan utama dari studi yang dianalisis berdasarkan tiga dimensi utama.

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Empiris Transformasi Digital dan Ketimpangan Perkotaan

Dimensi	Temuan Utama	Sumber Kunci
Akses digital	Akses tinggi di perkotaan, namun timpang antarwilayah dan kelas sosial	Kartiasih et al. (2022); Wati et al. (2024)
Pemanfaatan	Penggunaan produktif terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan menengah ke atas	Kristyanto & Jamil (2023); Hargittai (2018)
Dampak ekonomi	Pertumbuhan ekonomi tidak diikuti penurunan ketimpangan	Simbolon & Sirait (2025); Kustanto (2024)

Berdasarkan sintesis ini, terlihat bahwa transformasi digital beroperasi sebagai mekanisme reproduksi ketimpangan melalui proses kumulatif. Akses yang timpang membatasi pemanfaatan, dan pemanfaatan yang terbatas menghasilkan dampak ekonomi yang tidak merata. Pola ini konsisten dengan konsep ketimpangan interseksional yang dikemukakan oleh Choczyńska (2024), di mana faktor kelas, pendidikan, dan lokasi saling memperkuat eksklusi digital.

Model Konseptual Reproduksi Ketimpangan Digital

Berdasarkan hasil analisis, mekanisme reproduksi ketimpangan dapat diringkas dalam diagram berikut.

Diagram ini menunjukkan bahwa transformasi digital bukan faktor netral. Ia berinteraksi dengan struktur sosial ekonomi yang telah ada. Tanpa intervensi kebijakan yang terarah, digitalisasi cenderung memperkuat posisi kelompok yang sudah diuntungkan.

Implikasi Teoretis dan Kebijakan

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa kesenjangan digital tidak berhenti pada akses, tetapi berlanjut pada hasil sosial ekonomi. Secara kebijakan, temuan ini menegaskan perlunya pendekatan transformasi digital yang berbasis keadilan sosial dan spasial. Ningrum (2025) dan Al Waroi et al. (2025) menekankan pentingnya perencanaan digital yang adaptif terhadap karakter demografis dan sosial Indonesia. Tanpa pendekatan tersebut, transformasi digital

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

berisiko menjadi faktor struktural baru dalam reproduksi ketimpangan sosial ekonomi di wilayah perkotaan.

KESIMPULAN

Transformasi digital telah menjadi pendorong utama perubahan ekonomi dan sosial di wilayah perkotaan Indonesia. Namun, hasil kajian ini menunjukkan bahwa proses tersebut tidak bersifat netral terhadap distribusi kesejahteraan. Transformasi digital beroperasi dalam struktur sosial ekonomi yang timpang dan cenderung mereproduksi ketimpangan yang telah ada. Ketimpangan akses infrastruktur digital, perbedaan literasi teknologi, dan variasi kemampuan memanfaatkan peluang ekonomi digital menjadi mekanisme utama yang memperlebar jarak antar kelompok sosial di perkotaan.

Sintesis empiris menunjukkan bahwa kelompok berpendapatan menengah dan tinggi memperoleh manfaat ekonomi lebih besar dari digitalisasi melalui akses pasar, pekerjaan berbasis platform, dan layanan publik digital. Sebaliknya, kelompok miskin perkotaan menghadapi keterbatasan adaptasi akibat rendahnya kualitas konektivitas, kepemilikan perangkat, dan keterampilan digital. Kondisi ini berdampak pada peluang kerja, pendapatan, dan partisipasi sosial. Pertumbuhan ekonomi digital yang tercatat dalam berbagai studi tidak secara otomatis diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan perkotaan.

Implikasi kebijakan dari temuan ini menekankan pentingnya pergeseran orientasi transformasi digital. Kebijakan tidak cukup hanya berfokus pada ekspansi infrastruktur dan inovasi teknologi. Pemerintah perlu mengintegrasikan agenda keadilan sosial melalui peningkatan literasi digital, perlindungan kelompok rentan, dan pendekatan spasial yang sensitif terhadap ketimpangan intra-perkotaan. Intervensi negara berperan penting dalam memastikan bahwa digitalisasi menjadi instrumen pengurangan ketimpangan, bukan sumber eksklusi baru.

Artikel ini menegaskan bahwa transformasi digital di wilayah perkotaan Indonesia harus dipahami sebagai proses sosial ekonomi yang kompleks. Pendekatan kebijakan yang inklusif, berbasis bukti empiris, dan berorientasi jangka panjang menjadi prasyarat untuk mencegah reproduksi ketimpangan sosial ekonomi di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Agwenyi, C. A., & Wabwoba, F. (2024). The deepening digital divide: Inequality in the information society. *International Journal of Science and Research Archive*, *13*(2). https://doi.org/10.30574/ijsra.2024.13.2.2105

Aini, M. A. (2025). Bridging the digital divide: Ensuring equitable access to education technology. *Edujavare*, *3*(1). https://doi.org/10.70610/edujavare.v3i1.800

Al Waroi, M. N. A. L., Subroto, A., & Supriyadi, I. (2025). Indonesia's demographics in the digital era: Opportunities and challenges towards a golden Indonesia 2045. *Asian Journal of Engineering, Social and Health*, *4*(1). https://doi.org/10.46799/ajesh.v4i1.512

Alfrianti, D., Ediraras, D. T., & Prijanto, B. (2025). Rethinking: The role of digital transformation. *International Journal of Latest Technology in Engineering, Management & Applied Science*. https://doi.org/10.51583/ijltemas.2025.1408000060

Bhuiyan, A. (2014). *Bridging digital divide: Neoliberal means with state control(?). In Digital divide and public policy* (pp. 1–20). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137344342_5

Chen, L. (2025). Smart cities and social equity: A review of digital urban governance in Southeast Asia.

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

International Journal of Social Science and Technology, *1*(1). https://doi.org/10.64391/ijssat.v1i1.001

Choczyńska, A. (2024). *Intersectional digital inequality in Indonesia*. Insights into Regional Development. https://doi.org/10.70132/a2853658265

Hargittai, E. (2018). *The digital reproduction of inequality*. In Social inequality and the digital age (pp. 295–316). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429494468-69

Hasbiah, Sutomo, D. A., Saifuloh, N. I., et al. (2024). Analisis studi longitudinal fenomena kemiskinan pasca pandemi Covid-19 perspektif ekonomi digital. *Indo-Fintech Intellectuals*, *4*(3). https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i3.1370

Isma, Y. S., Kardiati, D., Muslem, M., et al. (2025). Transformasi digital sebagai instrumen untuk memperluas aksesibilitas layanan publik. *Journal of Administrative and Social Science*, *6*(2). https://doi.org/10.55606/jass.v6i2.1904

Kartiasih, F., Nachrowi, N. D., Wisana, I. D. G. K., et al. (2022). Inequalities of Indonesia's regional digital development and its association with socioeconomic characteristics: A spatial and multivariate analysis. *Information Technology for Development*. https://doi.org/10.1080/02681102.2022.2110556

Koswara, A. (2024). Digitalisasi ekonomi di pedesaan: Mengkaji kesenjangan infrastruktur digital di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, *5*(3). https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i3.3407

Kristyanto, V. S., & Jamil, H. (2023). Digital transformation and its impact on inclusive growth: A four-decade experience in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, *24*(2). https://doi.org/10.18196/jesp.v24i2.19919

Kustanto, A. (2024). Bridging the digital gap: Analysing the impact of ICT diffusion on income inequality in Indonesia. *Economic Thought Journal*. https://doi.org/10.56497/etj2469303

Liotta, L. A. (2023). Digitalization and social inclusion: Bridging the digital divide in underprivileged communities. *Global Studies Review*, *1*(1). https://doi.org/10.59613/global.v1i1.2

Nasution, Z., Japina, H., & Amrizal. (2025). Digital transformation: HDI, consumption, and inclusive economic growth link. *Economics Development Analysis Journal*, *14*(2). https://doi.org/10.15294/edaj.v14i2.24111

Ningrum, S. (2025). From digital exclusion to adaptive inclusion: Policy innovations to bridge social divides in next-generation regional planning in Indonesia. *KnE Social Sciences*, *10*(18). https://doi.org/10.18502/kss.v10i18.19599

Ningsih, U., Alpendi, A., & Dewi, A. S. (2024). Kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia: Penyebab, dampak, dan solusi kebijakan. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, *5*(3). https://doi.org/10.22373/jsai.v5i3.6037

Noer, M. R., Damara, M. D., Situmorang, R. M., et al. (2025). Pengentasan kemiskinan dan ketidakadilan: Tinjauan pada ketimpangan sosial di tengah kemajuan ekonomi di Indonesia melalui prinsip ekonomi. *Jurnal Ekbis (Ekonomi & Bisnis)*, *13*(1). https://doi.org/10.56689/ekbis.v13i1.1953

Putri, R. F., Aziz, I. N., Simon, J. C., et al. (2025). The digital economy's impact on middle-class dynamics in Southeast Asia: A case study of Indonesia. *International Journal of Science and Society*, *7*(1). https://doi.org/10.54783/ijsoc.v7i1.1373

Simbolon, R. L., & Sirait, T. (2025). Ketimpangan pendapatan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Indonesia tahun 2019–2023. *Limits: Journal of Mathematics and Its Applications*. https://doi.org/10.12962/limits.v22i2.3912

Sujarwoto, & Tampubolon, G. (2013). Deepening digital divide and widening spatial gaps in Indonesia 2005–2009. *Social Science Research Network*. https://doi.org/10.2139/SSRN.2348729

Sunuantari, M. (2021). R-TIK digital transformation towards Indonesia information society. International *Journal of Social Science and Human Research*, *4*(5). https://doi.org/10.47191/IJSSHR/V4-I5-12

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.

Suryawan, D. A. R., Suharno, & Supriyanto. (2025). Income inequality in the digital era: Spatial analysis and its implications for economic equality. *Proceedings of ICSEMA*. https://doi.org/10.32424/icsema.1.1.24

Suyanto, Judijanto, L., Baruno, A. D., et al. (2024). Inovasi perekonomian digital dalam mengatasi disparitas regional: Strategi baru dalam kebijakan perekonomian di Indonesia. *Journal of Management and Bussines (JOMB)*, *6*(3). https://doi.org/10.31539/jomb.v6i3.8482

Tahir, M., Tinri, M. D. N., & Anas, F. (2025). Dinamika kesenjangan sosial di perkotaan: Studi kasus pada komunitas miskin di Makassar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *14*(2). https://doi.org/10.23887/jish.v14i2.86657

Triono, T. A. (2024). Systematic literature review: Membangun kesejahteraan sosial Indonesia, peluang dan hambatan. *Journal of Society Bridge*, *2*(2). https://doi.org/10.59012/jsb.v2i2.46

Uang, Y., & Susniwati. (2025). Revolusi digital dalam pelayanan publik: Solusi cepat dan transparan untuk masyarakat kepulauan. *Antasena*, *3*(1). https://doi.org/10.61332/antasena.v3i1.295

Wati, D. A. R., Čaplánová, A., & Darmo, Ľ. (2024). Identification of digital divide across Indonesian provinces: The analysis of key factors. *Statistika*, 3. https://doi.org/10.54694/stat.2024.3

Watif, M., Ramadhani, A., Jumiati, et al. (2024). Ketimpangan sosial dan kemiskinan pada masyarakat perkotaan. *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, *3*(4). https://doi.org/10.56799/peshum.v3i4.3811

Copyright © 2025, the author(s). This is an open access article under the CC-BY-SA License.